

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI  
UMUM, JUMLAH PENDUDUK MISKIN TERHADAP  
BELANJA BANTUAN SOSIAL  
(Studi Empiris Se-Pulau Jawa 2017)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh :

**RIKA SEKAR INDAH AMALIA**

**B 200 154 016**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,  
JUMLAH PENDUDUK MISKIN TERHADAP BELANJA BANTUAN  
SOSIAL  
(Studi Empiris Se-Pulau Jawa 2017)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**RIKA SEKAR INDAH AMALIA**  
**B 200 154 016**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen  
Pembimbing



**Drs. Wahyono, M.A., Akt**  
**NIDN. 9035801**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,  
JUMLAH PENDUDUK MISKIN TERHADAP BELANJA BANTUAN  
SOSIAL**

**(Studi Empiris Se-Pulau Jawa 2017)**

Yang ditulis oleh:

**RIKA SEKAR INDAH AMALIA**

**B200154016**

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Kamis, 07 Februari 2019  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

1. Dr Noer Sasongko, S.E, M.Si, Akt

(Ketua Dewan Penguji)

2. Andi Dwi Bayu Bawono, S.E, M.Si, Ph.D

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Dr Zulfikar, S.E, M.Si

(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Dr. Syamsudin, M.M**

**NIDN. 0017025701**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 7 Februari 2019

Penulis



**RIKA SEKAR INDAH AMALIA**

**B 200 154 016**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,  
JUMLAH PENDUDUK MISKIN TERHADAP BELANJA BANTUAN  
SOSIAL  
(Studi Empiris Se-Pulau Jawa 2017)**

**Abstrak**

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang melanda negara berkembang termasuk Indonesia. Meskipun presentase kemiskinan di Indonesia menurun dari tahun ke tahun, namun penurunan tersebut masih dirasa lambat. Pulau Jawa sebagai salah satu pulau dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan sebagai salah satu pusat perekonomian nasional, namun masih banyak penduduk yang dilanda kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan anggaran Belanja Bantuan Sosial dibantu dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Jawa tahun 2017 PAD berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial, DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial, dan Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial.

**Kata Kunci:** PAD, DAU, Jumlah Penduduk Miskin, Belanja Bantuan Sosial.

**Abstract**

Poverty is one of the problems that hit developing countries including Indonesia. Even though the percentage of poverty in Indonesia decreases from year to year, the decline is still slow. Java Island is one of the islands with the largest population in Indonesia and as one of the national economic centers, but there are still many people who are hit by poverty. Various efforts have been made by the government in overcoming the problem of poverty. One of the efforts made by the government is budgeting the General Allocation Grants (DAU) and the Social Assistance Expenditures budget assisted by Local Government Revenue (PAD). Based on the results of research conducted in the regencies / cities in Java in 2017 the PAD has an effect on Social Expenditure Budgeted, the DAU has no effect on Social Expenditures Budgeted, and the Population Amount does not affect Social Expenditures Budgeted.

**Keywords:** local government revenue, general allocation grants, poverty, social expenditure budgeted

## **1. PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan global dan tak kunjung usai, sebab kemiskinan merupakan fenomena yang hampir terjadi di seluruh negara

berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang masih sangat sulit untuk diselesaikan. Padahal salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mengurangi tingkat kemiskinan.

Jika diuraikan satu persatu, jumlah faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat kemiskinan cukup banyak. Mulai dari tingkat laju pertumbuhan output atau produktivitas, tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, tingkat investasi, pajak dan subsidi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam di suatu wilayah, etos kerja dan motivasi kerja, kultur budaya atau tradisi, bencana alam hingga peperangan, politik dan lain-lain (Tambunan 2001 dalam Jurnal Wishnu Adhi tahun 2011).

Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi. Persoalan kemiskinan menjadi salah satu kebijakan pembangunan di setiap negara. Untuk mengatasi kemiskinan diperlukan berbagai upaya pembangunan dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaksanakan fungsi pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan otonomi daerah dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Aspek desentralisasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antar pusat dan daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Prinsip Umum Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Daerah pasal 279 ayat 1 yang berbunyi “Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.

Kemiskinan yang menjadi salah satu masalah pembangunan di Indonesia membuat pemerintah harus berupaya untuk mengurangi kemiskinan dengan

berbagai program dan pembiayaan. Salah satu upaya pembiayaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (Pempus) ke Pemerintah Daerah (Pemda).

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, PAD berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

Selain dari PAD dan DAU pemerintah juga mengeluarkan dana untuk mengentaskan kemiskinan berupa dana dari Belanja Sosial. Berdasarkan Peraturan Presiden No.46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, dinyatakan bahwa “Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanggulangan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara dan inklusivitas”.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun menjadi 7,26 persen pada September 2017. Sementara presentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen pada september 2017. Selama periode Maret 2017-September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sebanyak 401,28 ribu orang dari (10,67 juta orang pada Maret 2017 menjadi 10,27 orang pada September 2017), sementara di perdesaan berkurang sebanyak 786,95 ribu orang dari (17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 16,31 juta orang pada September 2017). Meskipun angka kemiskinan berkurang selama tahun 2017, namun kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang tidak bisa dianggap remeh.

Pulau Jawa sebagai salah satu pulau yang memiliki 5 provinsi dan 113 kabupaten menjadi salah satu pulau dengan jumlah penduduk terbanyak dan menjadi salah satu pusat perekonomian yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu pusat perekonomian Indonesia, tidakmenjamin bahwa permasalahan kemiskinan sudah terselesaikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil tema Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk Miskin terhadap Belanja Bantuan Sosial se-Pulau Jawa tahun 2017. Mengingat pulau Jawa sebagai salah satu pusat perekonomian terbesar di Indonesia, masih banyak penduduk miskin yang terdapat di pulau Jawa sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana pengaruh belanja sosial yang dianggarkan oleh pemerintah daerah didalam membiayai kebutuhan daerah yang berkaitan dengan Belanja Bantuan Sosial khususnya untuk menuntaskan jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten/Kota di pulau Jawa.

## **2. METODE**

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu laporan realisasi APBD per September 2017 dengan sampel Kabupaten dan Kota yang ada di Pulau Jawa yang diperoleh dari [djpk.depkeu.go.id](http://djpk.depkeu.go.id). Sedangkan data jumlah penduduk miskin berasal dari [bps.go.id](http://bps.go.id). Sampel penelitian ini diambil menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut : (1) Seluruh Kabupaten/Kota yang memiliki PAD, DAU, (2) Seluruh Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk miskin, (3) Seluruh Kabupaten/Kota yang memiliki Belanja Bantuan Sosial.

### **2.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Dalam variabel penelitian dan definisi operasional akan dijelaskan mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel independen yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Jumlah Penduduk Miskin sedangkan untuk variabel dependen menggunakan Belanja Sosial.

#### 2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu sumber pendapatan bagi daerah adalah PAD. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

#### 2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan salah satu komponen belanja APBN dan merupakan salah satu komponen pendapatan pada APBD yang dilakukan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

#### 2.1.3 Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan suatu individu maupun kelompok dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik dari sandang, pangan maupun papan. Kemiskinan menjadi salah satu persoalan yang pelik dan tak kunjung usai.

#### 2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja sosial merupakan bagian dari APBD yang dialokasikan dalam belanja tidak langsung. Tujuan dari belanja sosial yaitu untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen pemerataan dan keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja sosial harus memenuhi prinsip anggaran publik yang bersifat efektif, efisien, dan akuntabel.

## 2.2 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*). Model penelitian yang digunakan sebagai berikut :

$$Y_1 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y1	=Alokasi Belanja Bantuan Sosial se-Pulau Jawa tahun 2017
a	= Koefisien Konstanta
X1	= Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-pulau Jawa tahun 2017
X2	= Dana Alokasi Umum (DAU) se-pulau Jawa tahun 2017
X3	= Jumlah Penduduk Miskin se-pulau Jawa tahun 2017
b1,b2,b3	= Koefisien Regresi
e	= <i>error</i>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Uji Asumsi Klasik

#### 3.1.1 Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Jumlah Sampel	CLT ( <i>Central Limit Theorem</i> )	Keterangan
105	>30	Terdistribusi normal

Sumber : Data sekunder diolah penulis, 2018

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak. Hasil pengujian normalitas menggunakan *CLT (Central Limit Theorem)* atau Teorema Limit Pusat menunjukkan bahwa ukuran sampel lebih dari 30. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi dalam penelitian dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas.

### 3.1.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
PAD	0,953	1,050	Tidak terjadi multikolinearitas
DAU	0,837	1,195	Tidak terjadi multikolinearitas
JPM	0,831	1,203	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data Sekunder diolah penulis, 2018

Suatu data tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai VIF semua variabel kurang dari 10, sedangkan Tolerance Value diatas 0,10. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terbebas dari multikolinearitas.

### 3.1.3 Uji Heterokedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	sig	Keterangan
PAD	0,404	Tidak terjadi heterokedastisitas
DAU	0,780	Tidak terjadi heterokedastisitas
JPM	0,961	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber : Data Sekunder diolah penulis, 2018

Dari tabel 3 diketahui bahwa variabel bebas PAD, DAU dan JPM menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen PAD, DAU dan JPM bebas dari heterokedastisitas.

## 3.2 Uji Hipotesis

### 3.2.1 Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	Thitung	Sig.
Constant	7.256	2.176	0,032
PAD	0.12	4,487	0.000
DAU	-0,002	-0,433	0,666
JPM	4645,7	0,492	0,624

Sumber : data sekunder diolah penulis, 2018

Berdasarkan tabel 4 yang merupakan hasil regresi linear berganda dapat dilihat persamaan regresi sebagai berikut

$$Y = 7526337532,57 + 0,12 (\text{PAD}) - 0,002 (\text{DAU}) + 4645,7 \text{JPM} + e$$

### 3.2.2 Uji F

Tabel 5. Hasil Uji F

<b>Ftabel</b>	<b>p-value</b>	<b>Keterangan</b>
7,212	0.000	H <sub>0</sub> ditolak

Sumber : data sekunder diolah penulis, 2018

Dari tabel 5 diketahui bahwa Ftabel 7,212 dan p-value = 0.000 (< 0,005) . Hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU, JPM berpengaruh secara bersama-sama terhadap belanja Bantuan Sosial. Hal ini juga berarti bahwa model regresi yang dipakai *fit of goodness*.

### 3.2.3 Uji T

Tabel 6. Hasil Uji T

<b>Variabel</b>	<b>thitung</b>	<b>Sig</b>	<b>Keterangan</b>
PAD	4,487	0.000	H <sub>1</sub> diterima
DAU	-0,433	0.666	H <sub>2</sub> ditolak
JPM	0,492	0.624	H <sub>3</sub> ditolak

Sumber : data sekunder diolah penulis, 2018

1. Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa variabel PAD menunjukkan nilai signifikansi (sig t) variabel PAD sebesar 0.000 (< 0,005). Dengan demikian dalam penelitian ini **H<sub>1</sub> diterima**, sehingga variabel PAD berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial.
2. Variabel DAU memiliki nilai signifikansi (sig t) sebesar 0.666. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi DAU > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa **H<sub>2</sub> ditolak**, sehingga variabel DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial.
3. Variabel JPM memiliki nilai signifikansi (sig t) sebesar 0.624. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi JPM > 0,05. Dengan demikian bahwa **H<sub>3</sub> ditolak**. Dapat disimpulkan bahwa variabel JPM tidak berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial.

### **3.3 Pembahasan**

#### **3.3.1 Pengaruh PAD terhadap Belanja Sosial**

Variabel PAD berpengaruh terhadap variabel Belanja Sosial. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (sig t) variabel PAD sebesar 0.000 ( $< \alpha = 0,05$ ). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andri, Arman, Junaidi (2014), Julianis (2014), dan Puput Pustisari (2014).

Semakin tingginya PAD yang didapatkan oleh suatu daerah maka Belanja Sosial yang dikeluarkan pemerintah juga akan semakin besar. Sebaliknya, semakin rendah PAD maka Belanja Bantuan Sosial yang dikeluarkan pemerintah semakin sedikit (Puput, 2014).

#### **3.3.2 Pengaruh DAU terhadap Belanja Bantuan Sosial**

Variabel DAU tidak berpengaruh terhadap variabel Belanja Bantuan Sosial. Hal ini ditunjukkan oleh signifikansi (sig t) variabel DAU sebesar 0.666 ( $> \alpha = 0,05$ ) yaitu lebih besar dari 0,05. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Luluk (2015) dan Muhammad Nur (2015).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota masih sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Mengingat, DAU merupakan salah satu penerimaan daerah yang paling penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, diharapkan pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerahnya, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin kecil.

#### **3.3.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Belanja Bantuan Sosial**

Berdasarkan hasil penelitian, variabel JPM memiliki nilai signifikansi (sig t) sebesar 0.624 ( $> \alpha = 0,05$ ) yang berarti nilai signifikansinya lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini JPM tidak berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini, Made Dwi (2015) dan penelitian yang dilakukan oleh Agustien, Vekie, Debby (2015).

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana Belanja Bantuan Sosial di Kota/Kabupaten di Pulau Jawa belum maksimal mengingat hasil penelitian menunjukkan hasil yang tidak statistik sesuai dengan hipotesis. Perlunya peran pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan yang terjadi di setiap daerah dapat ditangani dengan berbagai program sehingga jumlah penduduk miskin bisa berkurang.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Variabel PAD berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial
- b. Variabel DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial
- c. Variabel Jumlah Penduduk Miskin tidak berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial

##### **4.2 Keterbatasan**

- a. Penelitian ini hanya dilakukan untuk jangka waktu satu tahun yaitu tahun 2017, sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisasi secara baik.
- b. Variabel independen yang digunakan hanya PAD, DAU, JPM, sehingga peneliti belum menguji variabel independen lain yang mungkin sangat memengaruhi variabel belanja bantuan sosial.
- c. Pengambilan sampel hanya dilakukan pada Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Pulau Jawa, sehingga tingkat generalisasinya kurang dan hasilnya mungkin akan berbeda jika penelitian diterapkan pada populasi yang berbeda.

##### **4.3 Saran**

- a. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan penelitian tidak hanya dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun saja, sehingga hasilnya dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun berikutnya.

- b. Sebaiknya digunakan variabel independen yang lebih beragam, mungkin masih banyak variabel lain yang memengaruhi alokasi Belanja Sosial yang dianggarkan pemerintah daerah.
- c. Ukuran sampel yang digunakan sebaiknya diperluas tidak hanya dari satu pulau yang ada di Indonesia, mungkin bisa menggabungkan antara pulau satu dengan yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustien, Vekie, Debby. "Pengaruh Belanja Modal, Belanja Sosial, & Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado". *Jurnal Universitas Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado*, Tahun 2015.
- Amiyati, Nuri, Andy Dwi Bayu Bawono. "Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DD) Terhadap Pengalokasian Belanja Pendidikan" Seminar Nasional dan The 5th Call for Syariah Paper, Surakarta,.
- Andri, Arman, Junaidi. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi". *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Volume 2 Nomor 2*, Tahun 2014.
- Arini, Made. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) & Belanja Tidak Langsung terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali Tahun 2007-2013". *E-Jurnal Universitas Udayana*, Volume 4 Nomor 9, Tahun 2013.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2016, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang.
- Bawono, Andy Dwi Bayu. 2015, The Role of Performance Based Budgeting in the Indonesian Public Sector; Dissertation, Department of Accounting and Corporate Governance, Faculty of Business and Economics, Macquarie University.
- Henri Edison. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir". *Thesis Universitas Sumatera Utara*, Tahun 2009
- Hermanto, Dwi. "Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin". *Jurnal Institut Pertanian Bogor*, Tahun 2006.

- Jolianis. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat". *Jurnal Universitas Muslim Indonesia* Volume 7 Nomor 1, Tahun 2016 Hal. 47-60.
- Luluk, Bambang. "Flypaper Effect Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah". *Jurnal Ilmu Riset & Akuntansi STIESIA Surabaya*, Volume 4 Nomor 9, Tahun 2015.
- Muhammad Nur. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Sulawesi Selatan". *Jurnal Universitas Muslim Indonesia*, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2016 Hal.78-88.
- Puput Puspitasari. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah & Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah". *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi STIESIA Surabaya*, Volume 4 Nomor 11, Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 *tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 *tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah.*